

DAMPAK PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Fatahul Rahman¹, Srihamdayani², L.M.Hasriadi³

¹Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda

²Jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-YPUP) Ujung Pandang

³Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda Kalimantan Timur.

¹Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo Kampus Gunung Panjang Kalimantan Timur Kode Pos: 75131, Indonesia.

²Jl. Andi Tonro No.17 Makassar Sulawesi Selatan Kode Pos: 093019, Indonesia

³Jl. Tanah Grogot, No.1 Kampus Gunung Kelua, Samarinda, East Kalimantan, Kode Pos: 75119, Indonesia.

fatahulrahman@polnes.ac.id

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak signifikansi penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan dan risiko yang dihadapi dalam penerapan SIKD serta memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka optimalisasi penggunaan SIKD. Kebaruan penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam hal; semua variabel eksogen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel endogen, kecuali variabel KPD3 tidak berpengaruh terhadap variabel KPKD6. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan model Partial Least Squares Model (PLS). PLS-SEM. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian sebanyak 611 responden, dan mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Temuan: Variabel eksogen seperti pelatihan SDM, dukungan teknologi, komitmen pimpinan, dan kepatuhan terhadap regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel endogen yaitu kualitas sistem informasi keuangan daerah. Kualitas sistem informasi keuangan daerah sebagai variabel mediasi juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Variabel komitmen pimpinan daerah hanya memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui variabel mediasi. Kesimpulan: Penelitian ini memiliki implikasi yang luas dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya di tingkat daerah.

Kata kunci: sistem informasi, keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah

Abstract

The main objective of this study is to evaluate the impact of the significance of using the Regional Financial Information System (SIKD) on improving efficiency, accountability, and transparency in regional financial management. In addition, this research will also identify barriers and risks faced in the implementation of SIKD and provide policy recommendations for optimizing the use of SIKD. The novelty of this research This research makes a significant contribution in the areas of; all exogenous variables have a positive and significant effect on endogenous variables, except for the KPD3 variable, which has no effect on the KPKD6 variable. Method: This research uses a quantitative approach, with the Partial Least Squares Model (PLS) model. PLS-SEM. The number of respondents used in the study were 611 respondents, and they worked according to their respective fields. Findings: Exogenous variables such as HR training, technology support, leadership commitment, and compliance with regulations have a positive and significant effect on endogenous variables, namely the quality of regional financial information systems. The quality of local financial information systems, as a mediating variable, also has a positive and significant relationship with the quality of public sector financial management. The local leadership commitment variable only has an indirect effect on the quality of public sector financial management through the mediating variable. Conclusion: This study has broad implications in efforts to eradicate corruption in Indonesia, especially at the regional level.

Keywords: information system, local finance, local financial management

A.PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survei lapangan, peneliti mengidentifikasi isu krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut (Hasiara, 2020). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa harus melibatkan masyarakat secara partisipatif (Syachbrani, W. 2024). Perkembangan pesat teknologi informasi belum sepenuhnya optimal dalam mengatasi tantangan pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu pemerintah melakukan desentralisasi untuk menghadapi era *new rules* saat ini (MARDIASMO, M. B. A., *et al* 2021). Akurasi data, keterlambatan laporan, dan kurangnya transparansi masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.



Perkembangan teknologi informasi belum mampu menjawab seluruh tantangan pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam hal akurasi data, tepat waktu penyampaian laporan, dan transparansi pengelolaan anggaran (Atmadja, N. M. D., & Suwanda, D. 2024). Laporan keuangan yang bagus itu harus benar-benar mengikuti aturan akuntansi pemerintah yang sudah ada, salah satunya yaitu harus punya kualitas tertentu (Irafah, S., et al 2020). Agar dianggap berkualitas, laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan memiliki karakteristik yang memenuhi syarat, seperti relevan, andal, dan dapat dibandingkan.

Sistem informasi keuangan daerah (SIKD) muncul sebagai solusi inovatif yang dirancang untuk mengatasi kendala-kendala tersebut (Putri, *et al* 2022). Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk mendokumentasikan, mengolah, dan menyajikan data keuangan daerah guna mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah (Irafah, S., *et al.* 2020). Penerapan SIKD diharapkan dapat mendorong terbentuknya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya praktik-praktik yang menyimpang (Yeni, E., Irman, M., & Fadrul, F. 2020). Efektivitas penerapan SIKD sangat bergantung pada penguasaan pengetahuan yang memadai oleh para pengelola keuangan daerah serta adanya komitmen dari instansi terkait untuk melakukan perbaikan secara berkala. (Sari, E. N., *et al* 2020).

Masalah yang menjadi fokus penelitian ini, adalah : 1) apakah pelatihan dan pengembangan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 2) apakah pelatihan dan pengembangan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, 3) apakah pelatihan dan pengembangan SDM berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui kualitas sistem informasi keuangan daerah, 4) apakah dukungan teknologi dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 5) apakah dukungan teknologi dan infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, 6) apakah dukungan teknologi dan infrastruktur berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui kualitas sistem informasi keuangan daerah, 7) apakah Komitmen Pimpinan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 8) apakah Komitmen Pimpinan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, 9) apakah Komitmen Pimpinan Daerah berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui kualitas sistem informasi keuangan daerah, 10) apakah Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 11) apakah Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, 12) apakah Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan berpengaruh tidak langsung positif signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui kualitas sistem informasi keuangan daerah, 13) apakah Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah ; 1) untuk mengetahui pengaruh penelitian dan pengembangan SDM terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 2) untuk mengetahui pengaruh dukungan teknologi dan infrastruktur terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 3) untuk mengetahui pengaruh komitmen pemimpin daerah terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 4) untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap peraturan kebijakan terhadap kualitas sistem informasi keuangan daerah, 5) untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan pengembangan SDM terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, 6) untuk mengetahui pengaruh dukungan teknologi dan infrastruktur terhadap kualitas keuangan sektor publik, 7) untuk mengetahui pengaruh komitmen pimpinan daerah terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, 8) untuk mengetahui pengaruh kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Berdasarkan kalimat-kalimat sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sistem informasi keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik secara keseluruhan.



Temuan baru yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penggunaan SIKD terhadap pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana SIKD dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan risiko yang dihadapi dalam implementasi SIKD serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan strategi implementasi yang lebih baik.

Dengan memahami dampak dan tantangan penggunaan SIKD, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif dalam meningkatkan pengelolaan keuangan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung tercapainya pemerintahan yang baik dan berintegritas.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (ISLAMI NOVETIA, M. E. G. A. 2018). Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Proses pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi harus ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif (Sains, F. S. 2018). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya.

2. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Pengembangan sumber daya manusia berhubungan erat dengan penyediaan berbagai kesempatan dan inisiatif untuk pembelajaran serta pengembangan individu (Bariqi, M. D. (2018). Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan merupakan investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan (Cahya, A. D., et al 2021). Melalui pelatihan dan pengembangan, perusahaan berupaya memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal (Suryani, S & Rindaningsih, I. 2023). Pelatihan adalah program pengembangan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan guna meningkatkan produktivitas dan kinerja (Andayani, T. B. N., & Hirawati, H. 2021). Sesuai penjelasan di atas, penulis ajukan hipotesis.

H1 : Pelatihan dan Pengembangan SDM berpengaruh langsung terhadap Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

H2 : Pelatihan dan Pengembangan SDM berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

H3 : Pelatihan dan Pengembangan SDM berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik melalui Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

3. Dukungan Teknologi dan Infrastruktur

Teknologi hadir sebagai solusi inovatif yang tidak hanya mengoptimalkan efisiensi waktu, usaha, dan pengeluaran dalam transaksi keuangan, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Dengan demikian, teknologi berkontribusi pada inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Fitri, F. K., Bay, A. Z., & Rulimo, P. L. 2024). Berkat teknologi analisis data, perusahaan dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai kinerja keuangan mereka, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selain itu, teknologi informasi juga berperan penting dalam meminimalkan kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi selama proses tersebut (Fitri, F. K., et al 2023). Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih tepat dan tetap mempertahankan nilai informasi yang penting. Infrastruktur



merupakan kumpulan sarana dan prasarana fisik yang esensial untuk menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Mamonto, N., 2018). Berdasarkan klaim di atas, hipotesis yang diajukan.

H4 : Dukungan Teknologi dan Infrastruktur berpengaruh langsung terhadap Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

H5 : Dukungan Teknologi dan Infrastruktur berpengaruh langsung terhadap Kualitas pengelolaan Keuangan Sektor Publik

H6 : Dukungan Teknologi dan Infrastruktur berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik melalui Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

4. Komitmen Pimpinan Daerah

Pimpinan yang memiliki komitmen tinggi akan menunjukkan pandangan yang sangat positif dan konsisten dalam menjalankan tugas mereka (Davici, N. 2018). Komitmen merupakan pondasi utama dalam penerapan Total Quality Management. Keberhasilan TQM sangat bergantung pada komitmen pemimpin dalam memberikan contoh dan menciptakan budaya kualitas di seluruh organisasi. Selain itu, komitmen dari setiap individu dalam organisasi juga sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas produk atau layanan (Suryatin, S., 2019). Dari penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan.

H7 : Komitmen Pemimpin Daerah berpengaruh langsung terhadap Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

H8 : Komitmen Pemimpin Daerah berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

H9 : Komitmen Pemimpin Daerah berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik melalui Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

5. Kepatuhan terhadap Peraturan dan Kebijakan

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aspek penting yang dievaluasi dalam penerbitan laporan keuangan sektor publik. Kepatuhan dalam pelaporan keuangan, seperti perubahan dari tidak patuh menjadi patuh terhadap aturan, dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik (Lumingkewas, G. S., *et al* 2021). Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan adanya salah saji material dalam informasi yang terdapat dalam laporan keuangan atau data keuangan lainnya yang berhubungan erat dengan tujuan pemeriksaan. Pada (Sari, E. N., & Lestari, S. 2018) . Oleh karena itu, perlu dilakukan perancangan pemeriksaan yang cermat untuk mendeteksi ketidapatuhan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Berdasarkan klaim di atas, hipotesis yang diajukan.

H10 : Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan berpengaruh langsung terhadap Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

H11 : Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

H12 : Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan berpengaruh tidak langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik melalui Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

6. Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah

Sistem Informasi Akuntansi pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerah (Yusnadi, R. 2018). Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelola keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah. Berdasarkan klaim di atas, hipotesis yang diajukan.

H13: Kualitas Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh langsung terhadap Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik

C.METHODOLOGYS



Desain pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan model Partial Least Squares Model (PLS). WarpPLS adalah perangkat lunak dengan antarmuka pengguna grafis untuk SEM berbasis varian dan berbasis faktor menggunakan PLS berbasis komposit klasik dan metode berbasis faktor yang lebih modern. Perangkat lunak ini dapat digunakan dalam penelitian empiris untuk menganalisis data yang dikumpulkan (misalnya dari survei) dan menguji hubungan yang dihipotesiskan (Memon, M. A., et al 2021). Populasi merujuk pada seluruh kelompok yang menjadi fokus suatu penelitian. Kelompok ini bisa terdiri dari manusia, hewan, peristiwa, atau benda yang memiliki kesamaan karakteristik dan hidup berdampingan dalam suatu ruang atau waktu tertentu Responden dalam penelitian ini sebanyak 612 responden yaitu pegawai pemerintah daerah. Sampel adalah bagian yang diambil dari kelompok yang lebih besar (populasi) untuk mewakili keseluruhan kelompok tersebut dalam sebuah penelitian. Dengan mempelajari sampel, kita bisa menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan (Amin, N. F., 2023). Kualitas analisis data sangat dipengaruhi oleh metode pengambilan sampel. Teknik statistik seperti estimasi dan uji hipotesis memungkinkan kita membuat inferensi tentang populasi berdasarkan data sampel, sehingga bisa memahami karakteristik keseluruhan populasi.

1. Teknik pengumpulan data kuantitatif

Data penelitian ini dikumpulkan berdasarkan hasil pengisian kuesioner oleh responden yang disebarluaskan melalui setiap OPD. Kuesioner dalam penelitian ini berbentuk skala Likert dengan alternatif dengan jawaban: respon tersebut selanjutnya diberikan angka, misalnya 1, 2, 3, 4 dan 5, jika pilihan responnya berjumlah 5 mulai dari Sangat Setuju, Setuju, Netral, Tidak Setuju hingga Sangat Tidak Setuju”. (Suasapha, A. H. 2020). Untuk menyatakan persetujuan seseorang terhadap sebuah pernyataan, mulai dari “Sangat Setuju”, sampai kepada “Sangat Tidak Setuju”.

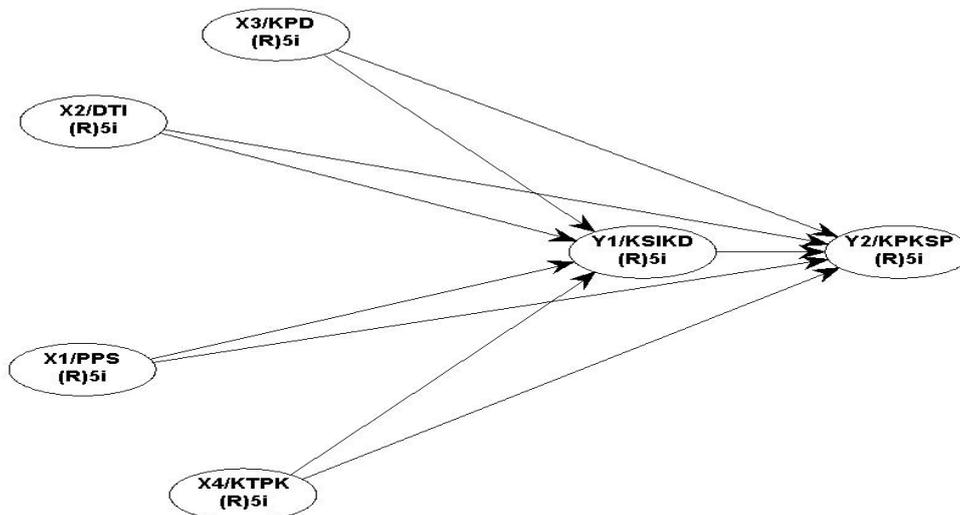


Figure 1 Research Conceptual Model Awal

D.ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengujian Outer Model

Dengan menggunakan teknik PLS, akan menguji hubungan antara indikator dan variabel laten dalam model. Tahap pertama adalah memastikan bahwa indikator-indikator tersebut valid untuk mengukur variabel laten yang bersangkutan.

Analisis Uji Variabel

Bagian ini memuat penjelasan hasil uji validitas dan uji reabilitas variabel yang digunakan dalam riset. Untuk memastikan bahwa instrumen penelitian kita valid dan reliabel.

Evaluasi Model Pengukuran



a. Outer Model**Tabel 1. Hasil output data yang berifat reflektif.**

Variabel dan Indikator	Loading Factor	Cronbach Alpha	Composite Reability	AVE
Pelatihan dan Pengembangan PPSDM1		0.889	0.919	0.695
PPSDM11	0.846			
PPSDM12	0.878			
PPSDM13	0.856			
PPSDM14	0.856			
PPSDM15	0.722			
Dukungan Teknologi dan Infrastruktur (DTI2)		0.913	0.935	0.744
DTI21	0.744			
DTI22	0.875			
DTI23	0.907			
DTI24	0.887			
DTI25	0.889			
Komitmen Pimpinan Daerah (KPD3)		0.892	0.921	0.699
KKD31	0.844			
KKD32	0.826			
KKD33	0.851			
KKD34	0.811			
KKD35				
Kepatuhan Terhadap Peraturan (KTP4)		0.902	0.927	0.699
KTP41	0.790			
KTP42	0.848			
KTP43	0.876			
KTP44	0.897			
KTP45	0.826			
Kualitas Informasi Keuanagan Daerah (KIKD5)		0.892	0.920	0.698
KIKD51	0.824			
KIKD52	0.840			
KIKD53	0.861			
KIKD54	0.854			
KIKD55	0.796			
Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD6)		0.918	0.939	0.754
KPKD61	0.831			
KPKD62	0.887			
KPKD63	0.903			
KPKD64	0.873			
KPKD65	0.846			

Sumber : data diola dari Smart-PLS Versi 8.0



Berdasarkan hasil analisis, nilai *the composite reliability* untuk setiap variabel adalah sebagai berikut: *Pelatihan dan Pengembangan SDM* = 0.919, *Dukungan Teknologi & Infrastuktur* = 0.935, *Komitmen Pimpinan Daerah* = 0.927, *Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan* = 0.927, *Kualitas Sistem Informasi Keuanagan Daerah* = 0.920, *Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik* = 0.939. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk penelitian telah mencapai tingkat reliabilitas yang memadai sesuai dengan kriteria minimum yang dipersyaratkan yaitu > 0,70 (Devi, O. S., et al 2022).

Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi validitas konvergen dengan mengacu pada nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai AVE pada masing-masing variabel yaitu *Pelatihan dan Pengembangan SDM* = 0.695, *Dukungan Teknologi dan Infrastuktur* = 0.774, *Komitmen Pimpinan Daerah* = 0.699, *Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Kebijakan* = 0.669, *Kualitas Sistem Informasi Keuanagan Daerah* = 0.698, *Kualitas Pengelolaan Keuangan Sektor Publik* = 0.754. Setiap konstruk memiliki skor yang lebih tinggi dari 0,5 (Devi, O. S., et al 2022), maka bisa diakui variabel-variabel itu juga cukup berbeda satu sama lain *discriminant validity*.

Analisis validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa nilai loading faktor yang diperoleh > 0,5. Nilai loading faktor harus sama dengan atau lebih besar dari 0,6 yaitu menggunakan *Rule of thumb*. (Suhartanto, D., et al 2020). Reliabilitas instrumen penelitian akan diuji menggunakan koefisien Cronbach Alpha. Nilai ambang batas yang digunakan adalah 0.6. Artinya, jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0.6, maka instrumen dianggap reliabel. Selain itu, nilai composite reliability dan Average Variance Extracted (AVE) juga akan dianalisis, dengan kriteria masing-masing ≥ 0.6 dan > 0.5. (Devi, O. S., et al 2022). Berdasarkan nilai-nilai yang tertera pada tabel, dapat disimpulkan bahwa semua item pengukur telah lolos uji validitas dan reliabilitas.

b. Inner Model

Evaluasi terhadap model struktural (inner model) dilakukan dengan menggunakan uji kesesuaian model (model fit test), koefisien jalur (path coefficient), dan nilai R². Uji kesesuaian model bertujuan untuk mengukur seberapa baik model yang dibangun mampu merepresentasikan data empiris. Hasil dari uji kesesuaian model beserta kriteria penilaiannya akan disajikan sebagai berikut :

Keterangan	Hasil	P-values	Kriteria	Status
APC	0.190	0.005	P < 0,05	Fit
ARS	0.421	<0.001	P < 0,05	Fit
AARS	0.417	<0.001	P < 0,05	Fit
AVIF	1.397	-	Acceptable if ≤ 5, Ideally ≤ 3.3	Fit
AFVIF	1.583	-	Acceptable if ≤ 5, Ideally ≤ 3.3	Fit
GoF	0.550	-	Small ≥ 0.1, Medium ≥ 0.25, Large ≥ 0.36	Fit
SPR	1.000	-	Acceptable if ≥ 0.7, Ideally = 1	Fit
RSCR	1.000	-	Acceptable if ≥ 0.9, Ideally = 1	Fit
SSR	1.000	-	Acceptable if ≥ 0.7	Fit
NLBCCR	1.000	-	Acceptable if ≥ 0.7	Fit

Sumber: Hasil output aplikasi Wrap-PLS pada *model fit and quality indices*.

Hasil analisis tabel menunjukkan bahwa APC, ARS dan AARS sebesar 0,190, 0.421 dan 0.417. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga indeks memenuhi kriteria penerimaan dengan nilai p yang lebih besar dari 0,05. Nilai AVIF dan AFVIF yang diperoleh adalah 1,397 dan 1.583 Karena nilainya ≤ 5, dan nilai Goodness of Fit (GoF) mencapai 0.550, maka model penelitian ini dinilai cukup baik dan dapat diterima. Kemudian nilai SPR sebesar 1.000 dan diterima karena ≥ 0.7, RSCR sebesar 1.000, dinyatakan ideally. Selanjutnya, nilai SSR sebesar 1.000, dinyatakan fit sebab ≥ 0.7, hal tersebut mengindikasikan bahwa 100% jalur pada model



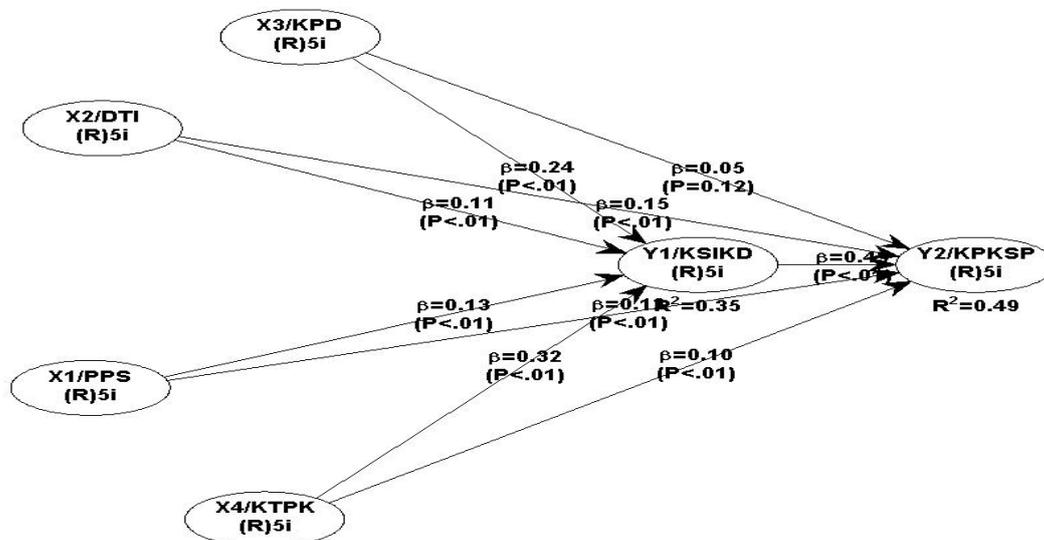
bebas dari penitikberatan statistic. Nilai NLBCDR sebesar 1.000, artinya fit sebab ≥ 0.7 . Berdasarkan sepuluh indeks yang digunakan, model penelitian ini dinyatakan sesuai dengan data.

2. Analisis Permodelan dan Uji Hipotesis

Arah hubungan kausal antara variabel independen dan dependen dianalisis menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan pendekatan analisis jalur. Kriteria penerimaan hipotesis penelitian adalah nilai signifikansi kurang dari 5%. Hasil pengujian hipotesis secara langsung disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Pengujian Pengaruh langsung dan tidak langsung

Hipotesis	Coeff.	p-value	Keterangan
H1: PPSDM1 → KIKD5	0.134	<0.001	Diterima
H2: PPSDM1 → KPKD6	0.117	0.002	Diterima
H3: PPSDM1 → KPKD6 → KIKD5	0.065	0.011	Diterima
H4: DTI2 → KIKD5	0.112	0.003	Diterima
H5: DTI2 → KPKD6	0.148	<0.001	Diterima
H6: DTI2 → KPKD6 → KIKD5	0.055	0.028	Diterima
H7: KPD3 → KIKD5	0.239	<0.001	Diterima
H8: KPD3 → KPKD6	0.048	0.116	Ditolak
H9: KPD3 → KPKD6 → KIKD5	0.055	<0.001	Diterima
H10: KTP4 → KIKD5	0.323	<0.001	Diterima
H11: KTP4 → KPKD6	0.103	0.005	Diterima
H12: KTP4 → KPKD6 → KIKD5	0.158	<0.001	Diterima
H13: KIKD5 → KPKD6	0.489	<0.001	Diterima



Gambar 2 Model Akhir Konseptual Penelitian



3. Pembahasan

Hasil analisis yang disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2 mendukung temuan penelitian ini. Analisis jalur yang dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel eksogen memiliki hubungan signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan variabel endogen. Bukti empiris yang mendukung pernyataan tersebut akan dipaparkan pada bagian berikut.

Hasil 1, berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan SDM secara langsung dan signifikan berkontribusi pada peningkatan kualitas sistem informasi keuangan daerah, karena nilai koefisien variabel komitmen pemerintah daerah berhubungan langsung positif-signifikan dengan variabel teknologi informasi bernilai $0,134 < 0,001$, sehingga hipotesis pertama diterima. Artinya jika variabel komitmen pemerintah daerah nilai koefisien lebih besar dari pada nilai p-value, maka variabel komitmen pemerintah daerah memiliki hubungan yang kuat langsung positif-signifikan dengan variabel teknologi informasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan (Yeni, E., Irman, M., & Fadrul, F. 2020) yang menyatakan bahwa variabel Pengembangan SDM berhubungan langsung terhadap variabel kualitas sistem informasi keuangan daerah.

Hasil 2, temuan ini mengindikasikan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM merupakan langkah strategis untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa $0,117 < 0,002$, karena itu hipotesis kedua diterima. Ini berarti bahwa semakin baik kualitas pelatihan dan pengembangan SDM, semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Penelitian ini memberikan dukungan lebih lanjut terhadap temuan (Reskiani, R., *et al* 2024), dengan demikian memperkuat pemahaman kita tentang peran penting pelatihan dan pengembangan SDM dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.

Hasil 3, pelatihan dan pengembangan SDM secara tidak langsung, melalui peningkatan kualitas sistem informasi keuangan daerah, berdampak positif dan signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, variabel tersebut memberikan pengaruh sebesar $0,065 < 0,011$, dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Artinya, peningkatan kualitas pelatihan dan pengembangan SDM secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan pada kualitas sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini mengonfirmasi temuan sebelumnya oleh (Muslimah, A., *et al* 2020) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelatihan SDM, sistem informasi keuangan daerah, dan kualitas pengelolaan keuangan.

Hasil 4, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara dukungan teknologi dan infrastruktur dengan kualitas sistem informasi keuangan daerah., disebabkan oleh nilai koefisien adalah $0,112 < 0,003$, maka hipotesis keempat diterima. Artinya jika koefisien variabel dukungan teknologi dan infrastruktur lebih besar dari pada nilai p-value, maka variabel dukungan teknologi dan infrastruktur berhubungan langsung positif dan signifikan dengan variabel kualitas sistem informasi keuangan daerah. Temuan hasil penelitian ini sesuai dengan temuan hasil penelitian yang dilakukan (Pratiwi, I. 2019) yang menunjukkan bahwa variabel dukungan teknologi dan infrastruktur berhubungan langsung positif-signifikan dengan variabel kualitas sistem informasi keuangan daerah.

Hasil 5, nilai koefisien $0,148$ yang signifikan secara statistik ($p < 0,001$) menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel dukungan teknologi dan infrastruktur akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik sebesar $0,148$ satuan., Hal ini mengkonfirmasi kebenaran hipotesis kelima. Nilai koefisien yang lebih besar dari nilai p-value mengindikasikan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bukan kebetulan, melainkan suatu hubungan yang nyata. Hasil penelitian ini mendukung temuan empiris sebelumnya (Wulandari, A. D., & Yuliati, A. 2023) yang menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara dukungan teknologi dan infrastruktur dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik.

Hasil 6, analisis data menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara dukungan teknologi dan infrastruktur dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, yang dimediasi oleh kualitas sistem informasi keuangan daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien $0,055 < 0,028$, Hal ini mengkonfirmasi kebenaran hipotesis keenam. Ini berarti bahwa semakin baik dukungan teknologi dan



infrastruktur, semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, terutama melalui peningkatan kualitas sistem informasi keuangan daerah. Penelitian ini menguatkan temuan (Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. 2020) yang mengindikasikan bahwa investasi dalam teknologi dan infrastruktur merupakan langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan keuangan sektor publik.

Hasil 7, nilai koefisien 0,239 < 0,001 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel komitmen pimpinan daerah akan diikuti oleh peningkatan yang signifikan pada variabel kualitas sistem informasi keuangan daerah, hal ini mengkonfirmasi kebenaran hipotesis ketujuh. Koefisien lebih besar dari p-value: Ini menunjukkan bahwa hubungan antara komitmen pimpinan daerah dengan kualitas sistem informasi keuangan daerah bukan kebetulan, melainkan ada hubungan yang nyata dan signifikan secara statistik. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya oleh (Suwarno, S., 2023), yaitu bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara komitmen pimpinan daerah dengan kualitas sistem informasi keuangan daerah.

Hasil 8, nilai koefisien 0,048 yang lebih kecil dari 0,116 mengindikasikan bahwa tidak ada bukti empiris yang cukup untuk menyatakan bahwa komitmen pimpinan secara langsung meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, Berdasarkan hasil analisis, hipotesis kedelapan harus ditolak. Maka tidak adanya koefisien signifikan pada variabel komitmen pimpinan menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki hubungan positif yang kuat dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Penelitian ini mengkonfirmasi hasil penelitian (Manimpurung, R., *et al* 2018) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen pimpinan, tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik.

Hasil 9, nilai koefisien 0,055 < 0,001 yang signifikan secara statistik menunjukkan bahwa komitmen pimpinan secara tidak langsung meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui perannya dalam meningkatkan kualitas sistem informasi keuangan daerah, dengan demikian hipotesis kesembilan ini diterima. Jika koefisien variabel komitmen pimpinan lebih besar dari nilai p-value, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara komitmen pimpinan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui variabel intervening kualitas sistem informasi keuangan daerah. Sama seperti penelitian (Alminanda, P., & Marfuah, M. 2018), penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen pimpinan secara tidak langsung mempengaruhi kualitas pengelolaan keuangan dengan melalui variabel kualitas sistem informasi keuangan daerah.

Hasil 10, Analisis data menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dengan kualitas sistem informasi keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,323 < 0,001, yang menunjukkan bahwa hubungan ini sangat signifikan secara empiris, oleh karena itu hipotesis kesepuluh dapat diterima. Ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, semakin baik pula kualitas sistem informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung temuan (Zamzami, Z., & Gowon, M. 2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kepatuhan terhadap aturan, semakin baik kualitas sistem informasi keuangan daerah.

Hasil 11, Analisis data menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Temuan ini didukung oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,103 > 0,005, yang artinya hubungan ini sangat kuat dan bukan kebetulan. Karena itu, hipotesis kesebelas terbukti benar atau diterima. Dengan kata lain, terdapat hubungan positif yang signifikan secara statistik antara tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh (Gasperz, J. J. 2019) yang menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik.

Hasil 12, Penelitian ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan dapat meningkatkan kualitas sistem informasi keuangan daerah, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kualitas pengelolaan keuangan sektor publik secara keseluruhan, Ini berarti bahwa kepatuhan terhadap aturan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan sistem informasi keuangan daerah dengan nilai 0,158 < 0,001, Dengan demikian, hipotesis kedua terbukti benar. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan secara tidak langsung antara perilaku pegawai pemerintah daerah dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik, yang



dimediasi oleh variabel kualitas sistem informasi keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung temuan (Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. 2021) yang menyatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik secara tidak langsung, yaitu melalui perbaikan sistem informasi keuangan daerah.

Temuan 13, Nilai koefisien yang signifikan menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik yang bernilai $0,489 < 0,001$, dengan demikian, hipotesis ketiga dapat diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara kualitas sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. Sejalan dengan penelitian (Anggraini, R. C., & Anwar, S. 2023), penelitian ini juga menemukan bukti kuat bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara kualitas sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik.

E.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 1) empat variabel eksogen berpengaruh langsung terhadap variabel endogen, yaitu: a) pelatihan dan pengembangan SDM, b) dukungan teknologi dan infrastruktur, c) komitmen pimpinan daerah, dan d) kepatuhan terhadap peraturan berhubungan langsung positif dan signifikan dengan kualitas sistem informasi keuangan daerah. 2) tiga variabel eksogen lainnya berhubungan langsung positif dan signifikan dengan variabel endogen, yaitu: a) pelatihan dan pengembangan SDM, b) dukungan teknologi dan infrastruktur, c) kepatuhan terhadap peraturan berpengaruh langsung positif dan signifikan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik. 3) satu variabel eksogen yang tidak berpengaruh langsung terhadap variabel endogen, yaitu: a) komitmen pimpinan daerah tidak berpengaruh langsung positif dan signifikan dengan variabel kualitas pengelolaan sektor publik. 4) pelatihan dan pengembangan SDM, b) dukungan teknologi dan infrastruktur, c) komitmen pimpinan daerah, dan d) kepatuhan terhadap peraturan berhubungan tidak langsung positif dan signifikan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik melalui kualitas sistem informasi keuangan daerah. 5) kualitas sistem keuangan daerah berhubungan langsung positif dan signifikan dengan kualitas pengelolaan keuangan sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alminanda, P., & Marfuah, M. (2018). Peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(2), 117-132.
- Amin, Nur Fadilah, Sabaruddin Garancang, and Kamaluddin Abunawas. "Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian." *Pilar 14.1* (2023): 15-31.
- Andayani, T. B. N., & Hirawati, H. (2021). Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Sdm Terhadap Kinerja Karyawan Pt Pos Indonesia Cabang Kota Magelang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(2), 11.
- Anggraini, R. C., & Anwar, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengelolaan Dana Kelurahan Dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dimediasi Akuntabilitas. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1622-1631.
- Atmadja, N. M. D., & Suwanda, D. (2024). *Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, IPDN).
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348.
- Bariqi, M. D. (2018). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. *Jurnal studi manajemen dan bisnis*, 5(2), 64-69.
- Sosial Ekonomi dan Bisnis



- Cahya, A. D., Rahmadani, D. A., Wijiningrum, A., & Swasti, F. F. (2021). Analisis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. *YUME: Journal of Management*, 4(2).
- Davici, N. (2018). Pengaruh tekanan eksternal, komitmen pimpinan dan faktor politik terhadap transparansi laporan keuangan (Studi empiris pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Agam). *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Devi, O. S., Tamara, D. A. D., & Mai, M. U. (2022). Minat Publik Terhadap Investasi P2P Lending Fintech Syariah di Alami Sharia: Produk, Akad, Imbal Hasil, Tingkat Keberhasilan Bayar. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 2(2), 409-420.
- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Rokan Hilir). *PEKBIS*, 12(1).
- Fitri, F. K., Bay, A. Z., & Rulimo, P. L. (2024). Implementasi Finansial Literasi Dan Finansial Teknologi Dalam Pengelolaan Keuangan Umkm Di Kabupaten Kolaka. *Journal Publicuho*, 7(2), 938-953.
- Gasperz, J. J. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Maluku). *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, 5(2), 75-83.
- Hasiara, L.O; A. M. D 2020. "Regional Government Management Strategy in Achieving Unqualified Opinion (UQO) in East Kalimantan Province, Indonesia." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net 12.9 (2020): 12.
- Irafah, S., Sari, E. N., & Muhyarsyah, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Internal Audit, dan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 337-348 Putri, Ratna Anugraheni, and I. Nyoman Suputra. "Pengelolaan arsip dinamis inaktif elektronik melalui aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) dan hambatanya di Dinas Perpustakaan." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)* 2.2 (2022): 246-255.
- Islami Novetia, M. E. G. A. (2018). Mplementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Kurniawan, Y. J., Herman Sjahruddin, S. E., Nuraeni, S. E., Swaputra, I. B., Astakoni, D. I. M. P., Par, M., ... & Agustina, E. S. (2023). Digitalisasi manajemen keuangan. *Cendikia Mulia Mandiri*.
- Lumingkewas, G. S., Kalangi, L., & Gerungai, N. Y. (2021). kepatuhan aparatur desa dalam penatausahaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 (Studi kasus pada desa taraitak kecamatan langowan utara kabupaten minahasa). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1).
- Mamonto, N., Sumampow, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw li Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).



- Manimpurung, R., Kalangi, L., & Gerungai, N. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Mardiasmo, M. B. A., *et al.* Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi, 2021.
- Memon, M. A., Ramayah, T., Cheah, J. H., Ting, H., Chuah, F., & Cham, T. H. (2021). PLS-SEM statistical programs: a review. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 5(1), 1-14.
- Muslimah, A., Laili, F., & Saidah, H. (2020). Pengaruh pemberian kombinasi perawatan payudara dan pijat oksitosin terhadap produksi asi pada ibu postpartum. *Jurnal Mahasiswa Kesehatan*, 1(2), 87-94.
- Pratiwi, I. (2019). Pengaruh dukungan manajemen puncak, kecanggihan teknologi informasi, kualitas sistem informasi akuntansi dan kinerja individual terhadap efektifitas sistem informasi akuntansi (Studi Pada Hotel Berbintang Tiga dan Empat Di Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(1), 50-63.
- Reskiani, R., Mahfudnurnajamuddin, M., & Budiandriani, B. (2024). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia serta Program Pelatihan dan Pengembangan terhadap Kinerja Organisasi di Sektor Pemerintahan Kota Parepare. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 2063-2069.
- Sains, F. S. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *The New Fraud Triangle Model Dengan Perspektif Syariah Dalam Mendeteksi Perilaku Fraud.* *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 4(1), 21-46.
- Sari, E. N., & Lestari, S. (2018). Pengaruh kompetensi dan time budget pressure terhadap kualitas audit pada BPK RI perwakilan provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 81-92.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, M., & Wahyuni, N. S. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166-197.
- Suasapha, A. H. (2020). Skala Likert Untuk Penelitian Pariwisata; Beberapa Catatan Untuk Menyusunnya Dengan Baik. *Jurnal Kepariwisata*, 19(1), 29-40.
- Suhartanto, D., Dean, D., Ismail, T. A. T., & Sundari, R. (2020). Mobile banking adoption in Islamic banks: Integrating TAM model and religiosity-intention model. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1405-1418.
- Suryani, S., & Rindaningsih, I. (2023). Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. *PERISAI: Jurnal Pendidikan dan Riset Ilmu Sains*, 2(3), 363-370.
- Suryatin, S., Anugerah, R., & Indrawati, N. (2019). Pengaruh sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, komitmen pimpinan, dan keteladanan pimpinan terhadap tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *PEKBIS*, 11(1).
- Suwarno, S., Lustrilanang, P., & Sunardi, S. (2023). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan Sistem Akuntansi Desa, Dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi Empiris Kecamatan Ciawi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(1), 165-174.
- Syachbrani, W. (2024). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 5(1).



- Vidyasari, F. N. A., & Suryono, B. (2021). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 637-649.
- Yeni, E., Irman, M., & Fadrul, F. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi (studi empiris pada Pemerintah Kota Pekanbaru). *Research in Accounting Journal (RAJ)*, 1(1), 64-88.
- Yusnadi, R. (2018). Implementasi Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Penegakan Disiplin Pegawai di lingkungan Kantor Camat Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Zamzami, Z., & Gowon, M. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening:(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Jambi). *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 6(3), 136-148.

